

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMBINAAN PEMERINTAH
TERHADAP KINERJA DAN STRUKTUR USAHA SUB SEKTOR
INDUSTRI KECIL PENGGERAK EKONOMI DAERAH
DI PROPINSI SUMATRA UTARA**

Dr. Sonang Sitohang, MM

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze and find empirical evidence of the affects of the government establishment policy, including; technical training support, government regulation support, capitalization support, marketing support, industrial and trade technical guidance supported for business performance and industrial structure unit development.

The most significant findings is the influence of the business performance on the business structure 0,8037. It is the highest coefficient value among the others. It proves that government is successful in arranging and managing its establishment by training support, government rules, capitalization, marketing, and industrial and trade technical guidance support as stated in Regulation No. 9, 1995 on the Small and Medium Enterprise Affair by increasing business structure from micro industry to small industry. Besides the main finding above, there are other research findings; the positive significance of the government rules on the business performance and business structure that do not support Vasant Desai Theory (2003), and the positive significance of the effects of the industrial and trade guidance on the business performance and doesn't support Mulyadi research (1999).

Keywords: *Government policy, Establishment, Performance, Business structure, Small industry, and Rural economic crusade.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sub Sektor Industri Kecil Penggerak Ekonomi Daerah (IK-PED) merupakan salah satu kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Depprindag, 1995; GBHN 1999/2004, Morison *et al.*, 2003). Untuk meningkatkan kontribusi sektor tersebut berbagai kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah melalui pembinaan secara berkesinambungan.

Peran PDB sektor industri terhadap PDB Nasional sebesar 25,24% tahun 1999, pada tahun 2000 meningkat sedikit menjadi 25,72% dan pada tahun 2001 sebesar 26,01% (RIP. IKM, 2002:15). Perbandingan antara unit usaha, tenaga kerja dan PDB adalah:

Tabel 1
Perbandingan Unit Usaha, Tenaga Kerja dan PDB

No.	Jenis Industri	Unit Usaha (ribu unit)	Tenaga Kerja (ribu orang)	PDB (Rp. Triliun)	Rasio PDB Terhadap:	
					(Rp.Juta/unit)	(Rp.Juta/orang)
1.	Industri Kecil dan Mikro	2.874,38	7.592,52	55,69	19,31	7,34
2.	Industri Menengah	11,44	3.771,25	54,38	4.751,92	14,42
3.	Industri Besar	0,76	249,25	218,34	366.489,31	1.111,60

Peran IB terhadap PDB jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IKM dan IM, namun dalam unit usaha dan penyerapan TK (*labour intensive*) IKM dan IM jauh lebih besar, sedang IB sangat kecil (*capital intensive*). Oleh sebab itu UKM perlu dilakukan secara berkesinambungan (*sustainable establishment*). Orientasi Kebijakan Pembinaan Pemerintah diarahkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi pengusaha IK-PED khususnya dan UKM umumnya, yaitu:

1. Rendahnya ketrampilan teknis
2. Peraturan Pemerintah berupa layanan perizinan yang kurang mendukung
3. Terbatasnya permodalan
4. Terbatasnya kemampuan pemasaran
5. Bimbingan teknis yang kurang memadai

(Murf, 1999; Manan, 1999; Deprind, 1995; Yudhoyono, 2005 dan Boediono, 2005).

Sejak PJP I (1969-1994), pembinaan telah dilakukan dengan berbagai program namun karena kompleksnya permasalahan IK-PED sampai saat ini juga masih tetap dilakukan pembinaan.

Yudhoyono (2005) juga menegaskan bahwa untuk meningkatkan kontribusi IK-PED khususnya dan IMKM umumnya di Indonesia, maka permasalahan IK-PED perlu diatasi melalui kebijakan pembinaan berkelanjutan dengan formula Empat Sehat Lima Sempurna, yaitu:

1. Bantuan pelatihan teknis
2. Peraturan pemerintah yang mendukung (kemudahan dalam izin usaha)
3. Bantuan permodalan
4. Bantuan pemasaran
5. Bantuan tenaga penyuluh Indag

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah terhadap kinerja dan struktur usaha Sub-sektor Industri Kecil di Provinsi Sumatera Utara, maka penelitian ini dilakukan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar-belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan teknis berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah kebijakan pembinaan melalui peraturan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara?
5. Apakah kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh industri dagang berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara?
6. Apakah kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan teknis berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara?
7. Apakah kebijakan pembinaan pemerintah melalui peraturan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara?
8. Apakah kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha IK-PED di Provinsi Sumatera Utara?
9. Apakah kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara?

10. Apakah kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh indag berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara?
11. Apakah kinerja usaha berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara?

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat:

1. Sebagai suatu sumbangan keilmuan dalam pengembangan Teori Kebijakan Pembangunan (*development policy*) khususnya sektor industri dan perdagangan dan pembangunan ekonomi (*economic development*) umumnya serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah sebagai pembina dan bagi pengusaha industri kecil.
2. Untuk memperluas wawasan tentang kebijakan pembinaan pemerintah sebagai upaya untuk mengembangkan IK-PED dalam rangka meningkatkan kinerja dan struktur pertumbuhan unit usaha.
3. Memberikan masukan bagi pengusaha IK-PED dalam rangka pengembangan usaha dengan memanfaatkan seoptimal mungkin program pembinaan pemerintah berupa pelatihan teknis, peraturan pemerintah melalui iklim usaha yang kondusif berupa kemudahan dalam proses penerbitan ijin usaha, permodalan, pemasaran serta bantuan tenaga penyuluh.
4. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian berikutnya khususnya penelitian yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan pemerintah terhadap industri kecil di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Hubungan Kebijakan Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pelatihan Teknis dengan Kinerja Usaha

Pelatihan adalah suatu proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan manusia. Pelatihan juga dapat mengubah perilaku mereka sehingga mereka dapat melakukan pekerjaannya lebih efektif. Pelatihan dapat diikuti oleh semua tingkatan pegawai di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pada tingkat yang lebih rendah, pelatihan itu bermanfaat untuk memberikan petunjuk bagaimana melakukan suatu tugas, seperti menjalankan sebuah mesin ataupun menulis sebuah laporan.

Hasil penelitian Sarder dan Rosa (1997), Cole (1999), Dana (1999), dan Murp (1999) menunjukkan bahwa kebijakan pembinaan melalui pelaksanaan pelatihan bagi para pengrajin dan industri kecil dapat meningkatkan kinerja usaha.

Manan (1999) yang meneliti dampak pola pembinaan terhadap kinerja sektor industri kecil di Provinsi Jawa Timur membuktikan bahwa pelatihan teknik produksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja usaha industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Timur.

Namun demikian pendapat di atas sangat kontradiktif dengan hasil penelitian Moeljadi (1999) yang melaporkan bahwa pelaksanaan pelatihan bagi industri kecil di Jawa Timur tidak berpengaruh signifikan (pengaruh langsung negatif) terhadap kinerja usaha industri kecil. Hal ini dikarenakan oleh:

- 1) Kesalahan menentukan sasaran pelatihan
- 2) Kurikulum kurang sesuai
- 3) Identifikasi kebutuhan peserta keliru
- 4) Kapasitas lembaga pelatihan tidak memadai
- 5) Pelaksanaan pola pelatihan pada Unit Pelayanan Teknis kurang dilengkapi alat peraga dan media belajar mengajar yang memadai

Mangkunegara (2003:51) menyatakan bahwa keberhasilan pelatihan paling tidak ditunjang oleh lima indikator yaitu (relevansi, efektivitas dengan prinsip berkesinambungan yaitu antara teori dan praktek); (1) mutu program pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan, (2) metode/ sistem belajar dan pengajaran yang digunakan oleh para instruktur dapat diterima oleh peserta, (3) perubahan perilaku yaitu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis peserta kearah yang lebih baik, (4) kompetensi para instruktur (pengajar) sudah tepat dan menguasai materi yang diajarkan, (5) pencapaian tujuan pelatihan teknis yaitu hasil akhir pelaksanaan pelatihan, sebagaimana ditetapkan sebelumnya yang digambarkan oleh adanya peningkatan kinerja usaha setelah mengikuti pelatihan teknis.

Hubungan Kebijakan Pembinaan Melalui Peraturan Pemerintah dengan Kinerja Usaha

The basic objective behind the whole process of regulations is to ensure that the results of operations conform of operation conform as closely as possible to established standards of goods, specified prosedures, or instructions. The small Scale Industry has to developt as an important segment of society: as such it has to athere to the rules of the land, i.e. it has to be subject to the various egulation. (Vasant, 2003).

Zeitham dalam Ridwan (2003:79) menyatakan item indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini terdiri dari 5 indikator yang tercakup dalam *tangible, reliability, responsiveness, competence, security, understanding the customer* yaitu:

- 1) Mekanisme layanan penerbitan izin

- 2) Kejelasan (kejujuran) rincian biaya pengurusan izin
- 3) Jangka waktu penyelesaian/ penerbitan izin
- 4) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi
- 5) Kemampuan petugas mengenai peraturan penerbitan izin

Hubungan Kebijakan Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Permodalan dengan Kinerja Usaha

Utami (1995:43) menyatakan bahwa kebijakan permodalan berpengaruh positif terhadap kinerja. Sementara itu, Karmakar (1996) menyebutkan bahwa kebijakan permodalan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Naro (2000) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan pengrajin dan penyerapan tenaga kerja pada industri kecil bordir di Jawa Timur, menemukan bahwa faktor kecukupan modal berpengaruh dominan terhadap peningkatan pendapatan para pengrajin industri kecil bordir dan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin besar modal yang dimiliki maka semakin tinggi pula kemampuannya untuk memperoleh pendapatan dan penyerapan tenaga kerja semakin besar.

Hubungan Kebijakan Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pemasaran dengan Kinerja Usaha

Kotler (1994:9) menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan tingkat kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Kotler juga menjelaskan, perusahaan yang cemerlang tahu bagaimana menyesuaikan diri pada pasar yang terus berubah, dengan melakukan perencanaan strategis yang berwawasan pasar. Mereka harus tahu mengembangkan dan menjaga keselarasan antara sasaran, sumber daya, kemampuan dan peluang. Mereka melakukan proses perencanaan strategis pada tingkat korporasi, tingkat bisnis dan tingkat produk.

Kebijakan pembinaan bantuan pemasaran bagi pengusaha industri kecil permodalan (UU Nomor 9 Tahun 1995) terdiri dari; (1) realisasi jumlah bantuan biaya promosi, (2) pemberian dana bantuan pameran, (3) bantuan informasi barang dalam negeri berupa penerbitan leaflet dan brosur, (4) keakuratan informasi harga dan mutu barang, (5) bantuan akses pasar luar negeri.

Berkaitan dengan hubungan promosi dan pemasaran dengan kinerja usaha, Dana (1999) dan Acar (1993) dalam penelitiannya tentang pengaruh faktor lingkungan internal pada perusahaan kecil yang diidentifikasi ke dalam lima kelompok yaitu; (1) pengalaman manajer/ pemilik dan umur perusahaan, (2) kemampuan produksi (*production*

competencies), (3) kemampuan pemasaran (*marketing competencies*), (4) kemampuan manajemen (*management competencies*) dan (5) strategi (*strategy*). Faktor internal dapat menunjukkan kekuatan (*strength*) ataupun kelemahan (*weakness*) dalam suatu perusahaan. Faktor eksternal dapat menimbulkan peluang (*opportunity*) maupun ancaman (*threat*) bagi perusahaan. Faktor ekstern meliputi; kemajuan teknologi, kebijakan dan peraturan pemerintah, perubahan strategi para pesaing, selera konsumen. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kemampuan promosi, pemasaran dan produksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja usaha.

Hubungan Kebijakan Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Penyuluh Industri dan Perdagangan (Indag) dengan Kinerja Usaha

Ivancevich *et al.* (1996) menyatakan bahwa perkembangan industri di Spanyol sangat didukung oleh jasa para konsultan pendamping/ penyuluh. Dengan ketersediaan tenaga penyuluh untuk memberikan bimbingan, ternyata banyak masalah yang dapat teratasi sehingga meningkatkan eksistensi usaha.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Moeljadi (1999) terhadap pengusaha industri kecil di Provinsi Jawa Timur melaporkan bahwa program asistensi atau bantuan penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja usaha. Keadaan ini disebabkan oleh sifat asistensi yang cenderung menimbulkan ketergantungan kegiatan usaha yang pada gilirannya menjadikan pengusaha kurang kreatif dan kurang inovatif. Program bantuan asistensi untuk penyuluhan teknik menyebabkan pengusaha terpola pada bentuk teknologi yang diberikan. Bantuan non-teknik berupa asistensi yang diharapkan bisa meningkatkan kinerja, ternyata memerlukan proses pemahaman yang lama.

Hasil penelitian Dana (1999) dan Murp (1999) menyatakan bahwa bantuan tenaga penyuluh (asistensi) yang diberikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja usaha. Sementara itu, hasil penelitian Manan (1999) melaporkan bahwa bantuan tenaga ahli mempunyai besaran koefisien regresi positif. Sistem bantuan yang diberikan kepada sub sektor industri kecil melalui Unit Pelayanan Teknis (UPT) pada sentra-sentra dengan melakukan penyuluhan cara berproduksi sehingga para pengusaha dapat mengambil manfaat bantuan tenaga penyuluh terutama yang terkait dengan teknik produksi.

Hubungan Kebijakan Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pelatihan Teknis dengan Struktur Usaha

Presse (1992) menyatakan bahwa hanya 13 persen dari total seluruh pengusaha kecil di Quebec yang mampu melakukan ekspor hasil produknya sebelum mengikuti pelatihan. Namun setelah pemerintah membantu melaksanakan program pelatihan, hampir tiga puluh dua setengah persen dari perusahaan telah tumbuh dalam tiga tahun setelah pelatihan terakhir dan mempunyai potensi akan lebih berkembang di masa akan datang, meskipun telah ditemukan teknologi baru berupa mesin-mesin otomatis dan komputerisasi berupa perangkat keras (*hardware*), maupun perangkat lunak (*software*), tetapi bagi sebagian besar perusahaan belum dapat melaksanakan kegiatan produksi secara efisien dan efektif jika tenaga kerja tidak ada. Selanjutnya meskipun tenaga kerja cukup tersedia dengan peralatan produksi yang lengkap tidak menjamin pekerjaan akan lancar tanpa ditunjang oleh keterampilan teknis dan kemampuan manajerial pengusaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang pemberdayaan usaha kecil menengah dinyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap UKM bertujuan untuk meningkatkan kinerja usaha, dengan demikian UKM tumbuh dan kemampuannya meningkat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

Selanjutnya Hema dan Garry (1999) menemukan bahwa di samping pertumbuhan unit dan ukuran, perusahaan, kemampuan bersaing (*market competition*), aset usaha, juga faktor keterampilan kerja memberikan sumbangan yang relatif besar terhadap struktur pertumbuhan unit usaha.

Hasil penelitian Camille (1999) di Quebec Canada terhadap sejumlah manajer usaha kecil melaporkan bahwa setelah mengikuti pelatihan teknis, terjadi perubahan pola pikir/perilaku pribadi para manajer. Ini dapat dibuktikan dari jumlah peserta pelatihan yang sebelumnya hanya 15% yang berstatus sebagai eksportir, namun setelah mengikuti pelatihan ternyata 50% dari peserta berambisi untuk melakukan kegiatan ekspor. Para manajer tersebut menyatakan keyakinannya setelah mengikuti pelatihan mereka mampu memperluas pemasaran ekspor atas bekal pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama mengikuti pelatihan, sebagai upaya meningkatkan keuntungan. Karena telah memiliki pengetahuan dan keterampilan, kemampuan membuat produk berkualitas sebagai salah satu syarat untuk barang ekspor hasil usaha kecil akan mampu melakukan ekspor.

Hubungan Kebijakan Pembinaan Melalui Peraturan Pemerintah dengan Struktur Usaha

Vasant (2003:148) menyatakan; *“regulation are the basis of steady growth. The Industrial Development Regulation Acts is an instrument in the hands of the government for the control and direction of private sector industrial investment through the mechanism of the industrial licensing system, which enables it to exert pressure on the applicants in a variety of ways. Conceptually, the government ought to direct further industrial investment in such product lines as would better serve the overall national interest an in such product lines as would better serve the overall national interest and in such geographical areas as need it the most”*.

Peraturan Pemerintah/ regulasi dengan struktur pertumbuhan unit usaha merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan sisi satu dengan sisi lain, karena adanya keterkaitan langsung di antara keduanya. Peraturan merupakan bagian dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan unit usaha mikro kecil dan menengah.

Hubungan Kebijakan Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Permodalan dengan Struktur Usaha

Menurut hasil penelitian Theo dan Low (1994), Wijewardena dan Shivas (1995), Tan dan Tay (1994), bantuan permodalan dari pemerintah mendorong pertumbuhan industri kecil menengah di Singapura dan Kobe, Japan.

Budiono (2005) menyatakan bahwa suatu kegiatan produksi akan bisa berlangsung apabila tersedia faktor-faktor produksi. Modal (*capital*) berupa mesin, gedung, dan sarana prasarana lainnya, merupakan faktor produksi yang berperan terhadap pertumbuhan unit usaha.

Pertumbuhan unit usaha dicerminkan oleh adanya perubahan secara struktur dari; (1) nilai investasi, (2) jumlah tenaga kerja yang terserap, (3) omzet penjualan (Disperindag, 1995). Menurut Kanwil Perindag Jatim (1993), dana bantuan permodalan dari pemerintah akan lebih bermanfaat terhadap perkembangan struktur usaha apabila; 1) akses terhadap sumber modal dapat diinformasikan dengan jelas bagi para pengusaha industri kecil oleh pemerintah, (2) pemerintah harus berperan aktif untuk membantu pendanaan usaha mikro dan kecil, (3) besarnya dana bantuan sesuai dengan kebutuhan saat ini, (4) jangka waktu pengembalian yang tidak terlalu cepat (lebih dari 12 bulan), (5) jenis modal cukup bervariasi, (6) biaya administrasi yang tidak terlalu besar dalam rangka mendapatkan dana pinjaman, (7) persyaratan administrasi yang tidak terlalu sulit untuk dipenuhi para pengusaha.

Menurut penelitian Premaratne (1999), kebijakan bantuan pemerintah di bidang permodalan dan bantuan bahan baku yang disalurkan bagi para pengusaha industri kecil berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penjualan hasil produksi. Demikian juga wilayah pemasaran bertambah setelah mendapatkan bantuan permodalan. Karena pengusaha mempunyai kemampuan untuk membeli bahan baku sesuai dengan kebutuhan saat ini tanpa dibebani biaya bunga yang relatif tinggi, membiayai proses produksi dalam jumlah relatif besar sehingga mampu melakukan ekspor ke Eropa dan Amerika Serikat.

Hubungan Kebijakan Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pemasaran dengan Struktur Usaha

Huck dan McEwen (1995) melaporkan hasil penelitiannya tentang pengaruh promosi dan pemasaran terhadap keberhasilan dan pertumbuhan usaha kecil di Jamaika. Berdasarkan hasil survei dan wawancara yang dilakukan terhadap 54 *manufacturing service small business* di Jamaika, menyatakan bahwa;” *marketing as most crucial for the succesful to the growth of a small business in Jamica*”.

Selanjutnya Khan dan Rocha (1982), Sa dan Deuhurts (1998), Dess dan Davis (1984) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menentukan efektivitas suatu perusahaan yang berkaitan dengan kemampuan pemasaran (*marketing competencies*) untuk mencapai target segmen pasar, maupun akses terhadap posisi pasar/ produk alternatif, yaitu; *pricing*, periklanan (*advertising*), promosi (*promotion*), distribusi (*distribution*), pelayanan purna jual (*after-sales customer service*).

Menurut Jauck dan Glueck (1999:165), pemasaran dan distribusi berarti memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dimulai dengan mencari hal-hal yang diinginkan konsumen, dan dapat tidaknya produk dan atau jasa dapat dijual dengan laba. Hal ini memerlukan riset pasar, pengidentifikasian pasar, pengembangan produk, pengujian reaksi konsumen, perhitungan produksi dan biayanya, penentuan keperluan distribusi dan pelayanan, memutuskan cara pengiklanan dan promosi.

Selanjutnya penelitian Sintaasih dalam Salim (1996) membuktikan bahwa faktor internal seperti promosi penjualan/ pameran, distribusi penjualan, bauran produk, jumlah tenaga kerja, kesejahteraan karyawan, kapasitas produksi dan kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja usaha berupa peningkatan penjualan dan wilayah pemasaran.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu seperti diuraikan di atas diketahui bahwa kebijakan pembinaan pemerintah berupa bantuan promosi dan pemasaran bagi usaha kecil menengah berkaitan erat dengan struktur pertumbuhan unit usaha. Hal ini dapat

dilihat dari adanya perubahan dan peningkatan nilai produksi dan penjualan, wilayah pemasaran produk, yang merupakan indikator dari struktur pertumbuhan unit usaha (Depperindag, 2002).

Hubungan Kebijakan Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Penyuluh Industri dan Perdagangan (Indag) dengan Struktur Usaha

Gonzales (1999) menyatakan, “*specilized service that help inefficient decision - making in company management, - that is conculting cervice. Undoubtly make up one of the most dynamic sector of economy in most European Countries and in Spain,*”.

Pernyataan di atas diartikan bahwa jasa khusus yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan efisiensi di perusahaan adalah jasa tenaga konsultan pendamping. Tidak diragukan lagi bahwa penyuluhan terhadap para pengusaha meningkatkan dinamisasi ekonomi di kebanyakan di negara Eropa dan Spanyol.

Selanjutnya Viljoen (1991:1) menyatakan, “*...it concern with designing and implementation a firm adaption to change in its external environment, a response which we shall refer to as the firm strategic activities*”. Melalui pendampingan dapat memberikan hasil yang berbeda dengan yang tidak memperoleh pendampingan (Edward, 1994:19).

Depperindag (2002) melaporkan bahwa tingkat pertumbuhan unit usaha, penyerapan tenaga kerja, peningkatan jumlah investasi, nilai produksi, meningkat selama lima tahun terakhir (1999-2003) setelah mendapat pembinaan. Peningkatan rata-rata setiap tahun masing-masing 9,0% untuk peningkatan jumlah unit usaha, 7,8% peningkatan penyerapan tenaga kerja. Jumlah investasi sebesar 8,8% dan pertumbuhan nilai produksi 7,8% khusus IMKM-PED makanan olahan di Provinsi Sumatera Utara.

Hubungan Kinerja Usaha dengan Struktur Usaha

Kinerja usaha merupakan prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan sering di ukur dengan cara melihat kinerja keuangan (tingkat laba usaha) yaitu berdasarkan data fundamental perusahaan seperti laporan keuangan (Neraca, Perhitungan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal). Kinerja Usaha (pendapatan perusahaan) dihitung menggunakan rumus:

- *Return on Sales* (ROS) yaitu rasio laba usaha terhadap hasil penjualan.

$$\frac{\text{Laba Usaha}}{\text{Hasil Penjualan}} \times 100\%$$

- *Return on Investment* (ROI) yaitu rasio laba usaha terhadap total investasi.

$$\frac{\text{Laba Usaha}}{\text{Total Investasi}} \times 100\%$$

Struktur pertumbuhan unit usaha adalah perubahan strata usaha (*manufactur structure level*) dari strata usaha mikro menjadi usaha kecil dan dari strata usaha kecil meningkat menjadi usaha menengah yang kuat tangguh dan mandiri, dapat dicerminkan oleh adanya perubahan; (1) pertumbuhan jumlah unit usaha, (2) jumlah investasi, (3) jumlah produksi, (4) nilai penjualan, (5) jumlah tenaga kerja yang terserap, (6) persentase jumlah produksi yang dapat diekspor atas prestasi usaha, investasi dalam meningkatkan sarana dan prasarana produksi yang dilakukan dan bantuan pembinaan pemerintah (UU Nomor 9 tahun 1995; Disperindag, 1995; dan Devine *et al.*, 1994).

Untuk mewujudkan terciptanya industri mikro, kecil yang kuat mandiri dan berkembang menjadi industri menengah sebagaimana yang terkandung dalam pasal 4 UU Nomor 9 tahun 1995 tentang pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Indonesia, pemerintah pada tahun 1995 telah menetapkan kebijakan pembinaan industri kecil melalui program bantuan pelaksanaan pelatihan, iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan perijinan usaha, bantuan permodalan, bantuan promosi dan pemasaran serta pemanfaatan Tenaga Penyuluh Industri di daerah-daerah (Depperind, 1995).

Kebijakan pembinaan yang sama dan searah terhadap industri mikro, kecil dan menengah di Indonesia juga dipertegas dan di dukung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 Pebruari 2005 dalam pidatonya menyambut tahun mikro keuangan di gedung *SMESCO Promotion Center* Jakarta, dengan menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan, miningkatkan penyerapan tenaga kerja, memberikan kesempatan berusaha seluas-luasnya, adalah melalui pemberdayaan UKM. Oleh sebab itu kebijakan pembinaan yang dilakukan adalah program dengan formula empat sehat lima sempurna yaitu peningkatan keterampilan SDM (pelatihan), iklim usaha yang kondusif melalu peraturan dan kemudahan dalam perijinan bantuan permodalan, promosi dan pemasaran hasil produk baik dalam maupun ekspor, dan kemampuan manajerial.

Melalui kebijakan pembinaan pemerintah diharapkan kinerja IMKM akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan struktur pertumbuhan unit usaha pula. Hal senada juga disampaikan oleh Budiono (2005). Program pembinaan ini diharapkan dapat

mengatasi kendala yang dihadapi oleh para pengusaha IMKM, berupa rendahnya keterampilan teknis dan kemampuan manajerial, iklim usaha (peraturan pemerintah) yang kurang kondusif, keterbatasan modal, kesulitan dalam promosi pemasaran produk dan keterbatasan tenaga penyuluh/pendamping dapat diminimisasi sehingga kinerja usaha IMKM dapat meningkat (Murp, 1999).

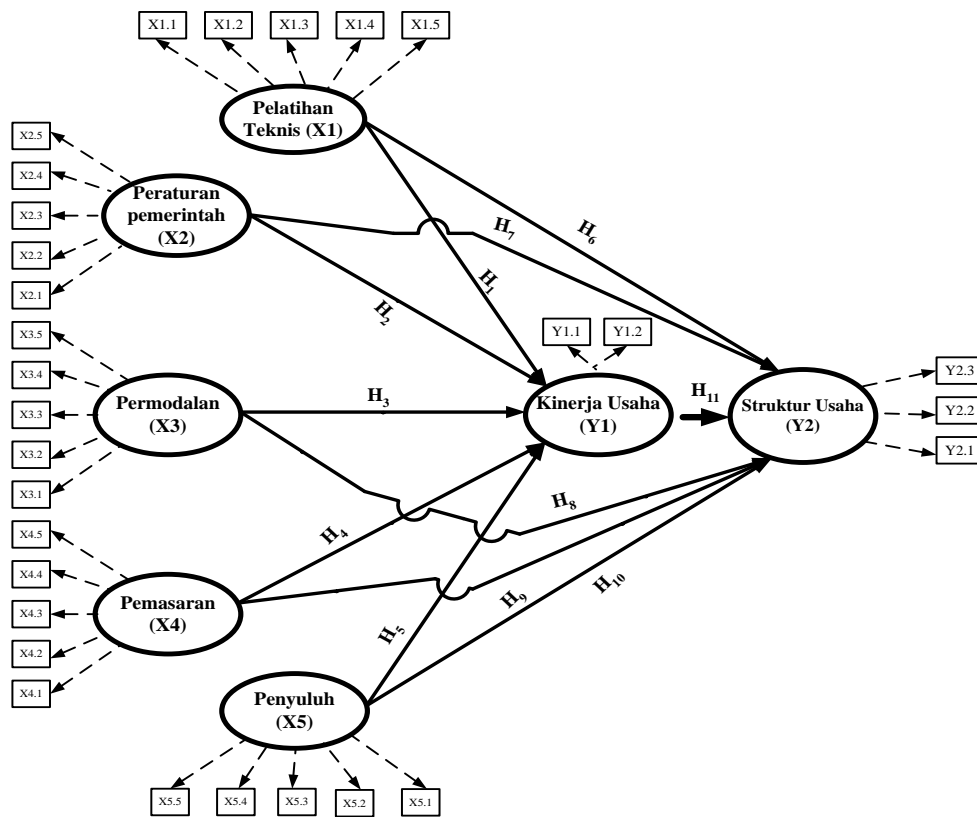
Selanjutnya Tambunan (1999:35) menyatakan bahwa keberhasilan pembinaan pemerintah terhadap peningkatan pertumbuhan unit usaha industri mikro kecil menengah tidak hanya berhasil di Indonesia, tetapi juga di negara lain melalui kebijakan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah seperti; Pilipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Peningkatan laba usaha/ pendapatan pengusaha sebagai hasil pembinaan memberikan dampak positif terhadap perkembangan unit usaha karena tumbuh dan perkembangan kegiatan industri skala mikro kecil dan menengah tersebut berarti penambahan permintaan terhadap tenaga kerja melalui pasar output, meningkatkan volume produksi, mempunyai kesempatan waktu dan dana untuk investasi.

Lebih lanjut Tambunan menyatakan bahwa peningkatan laba usaha/ pendapatan pengusaha mendorong minat dan kemampuan pengusaha untuk menanamkan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk diinvestasikan membeli mesin dan peralatan produksi yang baru sebagai pengganti mesin dan peralatan yang sudah aus dan ketinggalan jaman. Sehingga perusahaan akan dapat bekerja lebih efisien dan efektif yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap jumlah dan struktur pertumbuhan unit usaha.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar-belakang, rumusan permasalahan, dan tinjauan teori disusun kerangka konseptual seperti pada gambar 1.

Gambar 1
Kerangka Konseptual



Keterangan : = indikator variabel = variabel laten - - -> = dibentuk -> = mempengaruhi

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar-belakang, rumusan permasalahan, dan kerangka konseptual, disusun hipotesis sebagai berikut:

- H1: Kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.**
- H2: Kebijakan pembinaan pemerintah melalui peraturan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.**
- H3: Kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.**
- H4: Kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.**
- H5: Kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh indag berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.**
- H6: Kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan struktur unit usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.**
- H7: Kebijakan pembinaan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan struktur unit usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.**
- H8: Kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.**
- H9: Kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.**
- H10: Kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh indag berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.**
- H11: Kinerja usaha berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha sub sektor IK-PED di Provinsi Sumatera Utara.**

METODE PENELITIAN

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Industri Kecil Penggerak Ekonomi Daerah (IK-PED) yang pernah mendapatkan bantuan pembinaan dari pemerintah di Provinsi Sumatera Utara dengan rincian pada tabel 2.

Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *stratified sampling* yang dialokasikan secara proporsional atau metode *stratified proporsional sampling* (Sugiyono, 1999:101), karena penentuan besarnya sampel berdasarkan jumlah unit usaha yang berkembang di sentra binaan pemerintah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Menentukan lokasi penelitian yaitu sentra binaan pemerintah.
- 2) Penentuan populasi pada setiap unit usaha.
- 3) Penentuan komoditi yaitu berdasarkan pengelompokan yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- 4) Menentukan responden yaitu manajer (pengusaha) IK-PED yang sudah pernah mendapatkan bantuan pembinaan dari pemerintah.
- 5) Melakukan konsultasi dengan instansi lain di luar Depperindag seperti BPPS untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat pertumbuhan unit usaha IK-PED di provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan tabel 2 diketahui jumlah populasi sebanyak 2.468 unit usaha. Pada analisis SEM ada kriteria pengambilan sampel yaitu ukuran sampel minimum adalah sebanyak 5 observasi untuk setiap *estimated* parameter (Ferdinand, 2002:47). Dalam penelitian ini terdapat 30 indikator, sehingga jumlah sampel minimal yaitu $5 \times 30 = 150$ responden. Persentase proporsional pengambilan sampel pada setiap unit usaha adalah:

$$\frac{150}{2468} \times 100\% = 6,07\%.$$

Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan sampel dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Hasil Perhitungan Sampel

No.	Industri	Jumlah Unit Usaha (Populasi) (N)	Jumlah Sampel (n)	Daerah Pengambilan Sampel
1.	Makanan Ringan	843	51	Kab. Deli Serdang
2.	Tenun Gedongan Ulos	1183	72	Kab. Tapanuli Utara
3.	Pupuk Alam dan Organik	50	3	Kab. Karo, Labuhan Batu, Dairi
4.	Genteng	37	2	Kab. Deli Serdang, Simalungun
5.	Kapal kayu atau perahu	43	3	Sibolga, Tanjungbalai
6.	Perhiasan emas & perak	59	4	Langkat, Tebing Tinggi
7.	Alsintan dari besi /alogram	253	15	Binjai, Kab. Langkat
Total		2468	150	

Sumber: Hasil pengolahan data

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan sejumlah data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu para pengusaha IK-PED yang pernah mendapat bantuan teknis di Provinsi Sumatera Utara. Jenis atau macam data sekunder yang telah dikumpulkan adalah jumlah industri dan jumlah perusahaan yang sudah pernah mendapat bantuan pembinaan dari pemerintah berupa bantuan pelatihan teknis, peraturan pemerintah, bantuan permodalan, bantuan pemasaran dan bantuan tenaga penyuluh Indag.

Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan seluruh data dan informasi dari responden, disebarkan kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan yang dijawab oleh setiap responden. Di samping itu untuk melengkapi kuesioner tersebut dilakukan wawancara.

Identifikasi Variabel

Berdasarkan kerangka konseptual, terdapat dua kelompok variabel yaitu konstrak eksogen dan konstrak endogen. Konstrak eksogenous adalah kebijakan pembinaan pemerintah yang terdiri dari bantuan pelatihan teknis, peraturan pemerintah, permodalan, promosi dan pemasaran, bantuan tenaga penyuluh Indag. Konstrak endogen meliputi variabel kinerja usaha dan variabel struktur usaha.

Tabel 3
Identifikasi Variabel Penelitian

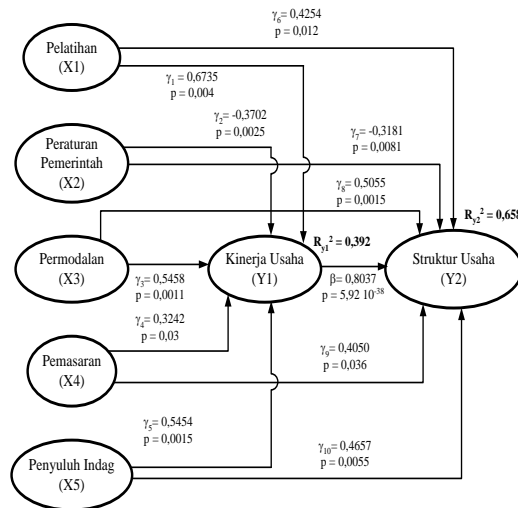
Nama variabel	Indikator (notasi)
Eksogen	Kebijakan Pembinaan Pemerintah (X) yang terdiri dari :
	Pelatihan (X1)
	Mutu program pelatihan (X1.1)
	Metode Pelatihan (X1.2)
	Perubahan perilaku pengusaha (X1.3)
	Kompetensi para Instruktur (X1.4)
	Hasil pencapaian tujuan pelatihan (X1.5)
	Peraturan pemerintah (X2)
	Mekanisme penerbitan izin (X2.1)
	kejelasan (kejujuran) petugas memberikan keterangan tentang biaya pengurusan penerbitan izin (X2.2)
	Jangka waktu pengurusan izin (X2.3)
	Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi (X2.4)
	Kemampuan pemahaman petugas mengenai peraturan penerbitan izin (X2.5)
	Permodalan (X3)
	Akses sumber bantuan modal (X3.1)
	Besarnya bantuan modal (X3.2)
	Jangka waktu pengembalian (X3.3)
	Variasi/jenis modal (X3.4)
	Persyaratan administratif yang diperlukan (X3.5)
	Pemasaran (X4)
Realisasi jumlah dana bantuan promosi (X4.1)	
Pemberian bantuan pameran (X4.2)	
Penyebaran informasi harga dalam negeri (X4.3)	
Keakuratan informasi harga mutu dan permintaan barang dari importir di luar negeri (X4.4)	
Akses pasar luar negeri (X4.5)	
Penyuluh Indag (X5)	
Metode penyuluhan (X5.1)	
Kompetensi para tenaga penyuluh (X5.2)	
Pembelajaran tentang prinsip pengelolaan usaha (X5.3)	
Perubahan perilaku para pengusaha (X5.4)	
Ketanggapan tenaga penyuluh terhadap masalah bisnis (X5.5)	
Endogen	Kinerja Usaha (Y1)
	Rasio Laba Usaha terhadap hasil penjualan sebelum dan sesudah dibina (Y1.1)
	Rasio Laba Usaha terhadap total investasi sebelum dan sesudah dibina (Y1.2)
	Struktur Usaha (Y2)
	Persentase pertumbuhan investasi sebelum dan setelah dibina (Y2.1)
Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja sebelum dan setelah dibina (Y2.2)	
Persentase peningkatan jumlah omzet penjualan (Y2.3)	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Pengujian pengaruh kebijakan Pembinaan pemerintah meliputi pelatihan, peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan tenaga penyuluh terhadap kinerja dan struktur usaha dilakukan dengan menggunakan model persamaan struktural. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2
Hasil Pengujian Pengaruh Kebijakan Pembinaan Pemerintah Terhadap Kinerja Usaha Dan Struktur Usaha



Sementara itu hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 4.

Tabel 4
Koefisien Jalur, Critical Ratio Dan Probabilitas Error Pengaruh Faktor-Faktor
Tata Kelola Pemerintah Terhadap Kinerja Dan Struktur Usaha

Variabel	Koef. Jalur	CR	Prob.	Keterangan
Pelatihan → Kinerja usaha	0,6735	2,8967	0,004	Signifikan
Peraturan pemerintah → Kinerja usaha	-0,3702	-3,0351	0,0025	Signifikan
Permodalan → kinerja usaha	0,5458	3,2801	0,0011	Signifikan
Pemasaran → kinerja usaha	0,3242	2,1767	0,003	Signifikan
Penyuluh indag → kinerja usaha	0,5454	3,1855	0,0015	Signifikan
Pelatihan → struktur usaha	0,4254	2,5213	0,012	Signifikan
Peraturan pemerintah → struktur usaha	-0,3181	-2,6602	0,0081	Signifikan
Permodalan → struktur usaha	0,5055	3,1959	0,0015	Signifikan
Pemasaran → struktur usaha	0,4050	2,1091	0,036	Signifikan
Penyuluh indag → struktur usaha	0,4657	2,7938	0,0055	Signifikan
Kinerja usaha → struktur usaha	0,8037	14,558	5,92 10 ⁻³⁸	Signifikan

Sumber: Hasil pengolahan data

Pembahasan

Pengaruh Kebijakan Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pelatihan Teknis Terhadap Kinerja Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil perhitungan AMOS 4.0 yang disajikan pada tabel 4 menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha. Ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif dengan nilai CR 2,8967 dan nilai probabilitas (p) sebesar 0,004 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Mangkunegara (2003), Ismail (2002), Depperindag (2002) dan *Human Capital* (Simanjuntak, 1998). Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan Sarder dan Rosa (1997), Cole (1999), Dana (1999), dan Murp (1999). Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Moeljadi (1999).

Pengaruh Kebijakan Pembinaan Melalui Peraturan Pemerintah Terhadap Kinerja Usaha IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil perhitungan AMOS 4.0 yang disajikan pada tabel 4 menunjukkan bahwa peraturan pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja usaha. Ini dapat dilihat dari koefisien jalur yang bertanda negatif dengan nilai *Critical Ratio* (CR) -3,0351 diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,0025, lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan peraturan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha diterima. Koefisien bernilai negatif karena sebenarnya tujuan peraturan pemerintah untuk menerbitkan izin-izin usaha adalah untuk memberikan legalitas dan keleluasaan bagi pengusaha, namun implementasi kebijakan pemerintah dalam menerbitkan izin usaha kurang sesuai dengan juknis sebagaimana ditentukan.

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Hesel (2003) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan harus disertai dengan evaluasi. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Perindag (2000) yaitu mengeskpor produk melalui pihak ketiga (eksportir Bali), Godfrey (1998) yaitu sulitnya mendapatkan izin ekspor, dan Rumerang (1992) yaitu sulitnya izin usaha menghambat pemanfaatan fasilitas kredit bank.

Pengaruh Kebijakan Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Permodalan Terhadap Kinerja Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil perhitungan AMOS 4.0 yang disajikan pada tabel 4 menunjukkan bahwa permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha. Ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif dengan nilai CR 3,2801 diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,0011, lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha diterima.

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Riyanto (1990), yaitu bantuan permodalan merupakan proses terus menerus selama perusahaan beroperasi. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Naro (2000), yaitu kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan para pengerajin industri kecil bordir di Jawa Timur. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Manan (1999) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan dan bantuan peralatan teknis memberikan pengaruh positif terhadap kinerja industri kecil di Jawa Timur.

Pengaruh Kebijakan Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pemasaran Terhadap Kinerja Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil perhitungan AMOS 4.0 menunjukkan bahwa pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha. Ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif dengan nilai CR 2,1767, diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,003, lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pemasaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha diterima.

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Jauch dan Glueck (1999) bahwa kebijakan pembinaan pemerintah dalam bidang pemasaran industri kecil juga mengikutsertakan langkah-langkah strategi pemasaran. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan Dana (1999) dan Acar (1993) yang menunjukkan bahwa kemampuan pemasaran, kemampuan manajemen dan kemampuan strategi berpengaruh terhadap kinerja usaha.

Pengaruh Kebijakan Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Penyuluh Indag Terhadap Kinerja Usaha IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil perhitungan AMOS 4.0 menunjukkan bahwa penyuluh industri dan perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha. Ini dapat ditunjukkan oleh koefisien jalur yang bertanda positif dengan nilai CR 3,1855, diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,0015, lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan penyuluh industri dan perdagangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha diterima.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Ismail (2003) tentang kegiatan penyuluhan/pendampingan dalam rangka peningkatan kinerja usaha IMKM-PED. Shapiro, Eccles dan Soske (1993), Ivancevich (1996) dan Hermosilla (1997) juga menyatakan bahwa kehadiran tenaga penyuluh dapat mengatasi beberapa kendala seperti cara meningkatkan daya saing, pengembangan mutu dan ketrampilan manajemen. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Dana (1999) tentang kerjasama dengan institusi lain terkait dalam memajukan pemasaran industri kecil.

Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Moeljadi (1999), karena pendampingan yang dilakukan pemerintah cenderung menimbulkan ketergantungan kegiatan usaha yang pada gilirannya menjadikan pengusaha kurang kreatif dan kurang inovatif.

Pengaruh Kebijakan Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pelatihan Terhadap Perkembangan Struktur Unit Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur usaha. Ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif dengan nilai CR 2,5213, diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,012, lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha diterima.

Hasil penelitian ini mendukung teori Suparmoko (2002) dan Mangkuprawira (2003) yang menyebutkan bahwa pelatihan tidak hanya dipandang sebagai suatu pembelajaran sesaat, melainkan proses belajar berkelanjutan di seluruh lapisan karyawan dalam meningkatkan perkembangan struktur usaha.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Presse (1992) yang menyatakan pelatihan di Quebec dapat meningkatkan pertumbuhan pengusaha 32,5%. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Suparmoko (2002), Hema dan Garry (1999) dan Camille (1999) yang menunjukkan bahwa pelatihan dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan produk, perluasan pasar dengan melakukan kegiatan ekspor dan pertumbuhan investasi.

Pengaruh Kebijakan Pembinaan Pemerintah Melalui Peraturan Pemerintah Terhadap Struktur Sub Sektor Usaha IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil analisis data menunjukkan bahwa peraturan pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur usaha. Ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda negatif dengan nilai CR -2,6602, diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,0081, lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan peraturan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap struktur unit usaha diterima.

Koefisien bernilai negatif karena implementasi peraturan pemerintah dalam penerbitan izin usaha pada kenyataannya kurang didukung oleh aparat pelaksana di lapangan, sehingga para pengusaha industri kecil enggan mengurus perizinan.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Vasant (2003) yang menyatakan bahwa peraturan pemerintah atau regulasi dengan struktur pertumbuhan unit usaha merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bido (2005) yang menunjukkan bahwa hambatan utama para pengusaha untuk menanamkan investasi baik dalam perluasan maupun membuka usaha baru di Jawa Timur adalah masalah perizinan. Namun, hasil

penelitian ini tidak mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Goldfrey (1997) yang menemukan bahwa industri kecil produk sabun tradisional berhasil menembus pasar Eropa, Afrika Selatan dan Amerika Utara karena didukung oleh kemudahan dalam perizinan untuk pemasaran ekspor.

Pengaruh Kebijakan Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Permodalan Terhadap Struktur Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil perhitungan AMOS 4.0 yang disajikan pada tabel 4 menunjukkan bahwa permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan struktur usaha. Ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif dengan nilai CR 3,1959, diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,0015, lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan permodalan berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha diterima.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Teo dan Low (1993) Wijewardena dan Shivas (1995), dan Tan dan Tay (1994) bahwa bantuan permodalan dari pemerintah berupa mesin, gedung, dan sarana prasarana lainnya mendorong pertumbuhan industri kecil menengah di Singapore, dan Kobe di Jepang.

Pengaruh Kebijakan Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Pemasaran Terhadap Struktur Unit Usaha Sub Sektor IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan struktur usaha. Ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif dengan nilai CR 2,1091, diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,036, lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pemasaran berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha diterima.

Hasil penelitian ini mendukung teori Kotler (1997) bahwa bantuan pemasaran menjadikan pengusaha dapat menyesuaikan diri pada pasar yang terus berubah, dengan melakukan perencanaan strategis yang berwawasan pasar. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Harimurti (1998) yang menyebutkan bahwa meningkatkan omzet penjualan dapat dilakukan melalui kegiatan 4P; pencarian informasi pemasaran, promosi, penghematan ongkos produksi, penjualan dan pelayanan konsumen.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khan dan Rocha (1982), Sa dan Deuhurts (1998) dan Dess dan Davis (1984) yang menunjukkan bahwa bantuan pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pemasaran para pengusaha industri kecil untuk mencapai target segmen

pasar, akses terhadap posisi pasar/ produk alternatif, dengan strategi harga, periklanan, promosi, distribusi, dan pelayanan purna jual.

Pengaruh Kebijakan Pembinaan Pemerintah Melalui Bantuan Penyuluh Indag Terhadap Struktur Usaha IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil analisis data menunjukkan bahwa penyuluh indag berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan struktur usaha. Ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif dengan nilai CR 2,7938, diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar 0,0055, lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan penyuluh indag berpengaruh signifikan terhadap perkembangan struktur unit usaha diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Manas (1992) bahwa para tenaga penyuluh/ pendamping sangat bermanfaat untuk mengembangkan usaha (pertumbuhan usaha) di bidang pemasaran organisasi, perbaikan mutu produksi. Sedangkan hasil penelitian Apibunyopas (1983) menunjukkan bahwa penyuluh dapat membantu pengusaha dalam merumuskan kebijakan strategi dalam memanfaatkan faktor produksi. Penyuluh membantu pengusaha dalam memanfaatkan kesempatan mencari ceruk pasar yang masih dapat diakses.

Pengaruh Kinerja Terhadap Struktur Usaha IK-PED Di Provinsi Sumatera Utara

Hasil perhitungan AMOS 4.0 yang disajikan pada tabel 4, menunjukkan bahwa kinerja usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan struktur usaha. Ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif dengan nilai CR 14,558, diperoleh nilai probabilitas (p) sebesar $5,92 \cdot 10^{-38}$, lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan kinerja usaha berpengaruh signifikan terhadap struktur usaha diterima.

Hasil penelitian ini memperkuat teori struktur usaha (Devine, 1994) yang menyatakan bahwa masing-masing struktur mempunyai karakteristik yang berbeda dilihat dari investasi, penyerapan tenaga kerja, omzet penjualan. Dari hasil uji beda menunjukkan adanya perbedaan dan pertumbuhan struktur usaha dari industri mikro menjadi industri kecil dan sebagian besar berada dalam kategori sedang sampai tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Tambunan (1999:67), Hema dan Garry (1999), Colm O’Gorman dan Rosalyn (1999), dan Camille (1999) yang membuktikan bahwa peningkatan laba usaha/ pendapatan pengusaha sebagai hasil pembinaan memberikan dampak positif terhadap perkembangan unit usaha karena tumbuh dan

perkembangan kegiatan industri skala mikro kecil dan menengah tersebut, berarti penambahan permintaan terhadap tenaga kerja melalui pasar output, meningkatkan volume produksi, mempunyai kesempatan waktu dan dana untuk investasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari hasil analisis data dan pembahasan adalah:

1. Kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja usaha.
2. Kebijakan pembinaan melalui deregulasi peraturan pemerintah dalam penerbitan izin usaha berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja usaha.
3. Kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja usaha.
4. Kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja usaha.
5. Kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh industri perdagangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja usaha.
6. Kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur usaha.
7. Kebijakan pembinaan pemerintah melalui peraturan pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur usaha.
8. Kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan permodalan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur usaha.
9. Kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan pemasaran berpengaruh positif signifikan terhadap struktur usaha.
10. Kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan penyuluh industri perdagangan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur usaha.
11. Kinerja usaha berpengaruh positif signifikan terhadap struktur unit usaha.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan dalam implementasi kebijakan pemerintah untuk membina industri kecil sebaiknya:

1. Meningkatkan pemberian bantuan pelatihan kepada para pengusaha industri kecil dalam: mutu program, pengajaran prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik, ketrampilan teknis produksi dan pemasaran, perubahan perilaku pengusaha dapat berlangsung setelah mengikuti pelatihan, kompetensi para instruktur, hasil akhir pencapaian tujuan pelaksanaan program pelatihan.

2. Mengevaluasi dan memperbaiki implementasi peraturan pemerintah dengan meningkatkan kualitas layanan pengurusan izin melalui layanan satu atap dalam pengurusan Ijin Industri, Tanda Daftar Industri, Ijin Perluasan Industri, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan atau segala perizinan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja usaha dan perkembangan struktur usaha. Selain itu biaya pengurusan sebaiknya tidak terlalu tinggi sehingga dapat dijangkau para pengusaha industri kecil, waktu pengurusan sesuai dengan standar layanan yang sudah ditetapkan jangan sampai tidak ada kepastian atau terlambat, persyaratan administratif disederhanakan dan tidak terlalu berbelit, kemampuan dan profesionalitas pegawai sangat diperlukan dalam memberikan penjelasan dan kelancaran pengurusan izin. Kesemuanya ini diperlukan sebagai aspek legalitas secara hukum maupun operasional ketika melakukan kegiatan pemasaran baik di dalam negeri apalagi berhubungan dengan pihak luar negeri.
3. Meningkatkan pemberian bantuan permodalan kepada para pengusaha industri kecil hendaknya dalam kemudahan mendapatkan akses sumber bantuan modal, realisasi bantuan permodalan yang disalurkan oleh pemerintah, penyesuaian jangka waktu pengembalian pinjaman modal dan bunga dengan hasil produksi dapat dipasarkan, jenis permodalan lebih variatif. Pemberian bantuan modal ini hendaknya diupayakan tidak saja meningkatkan pendapatan pengusaha industri kecil tetapi juga mampu meningkatkan pertumbuhan omzet penjualan dan pertumbuhan investasi.
4. Kegiatan bantuan pemasaran kepada para pengusaha industri kecil lebih diarahkan pada pencarian informasi pemasaran yang diperlukan, penonjolan diri untuk meyakinkan konsumen, pengurangan ongkos produksi dan penjualan, pelayanan konsumen bagi terciptanya kelangsungan pembelian, pendirian pusat-pusat pameran sebagai wadah bagi para IMKM untuk berpameran dan bertransaksi dengan *buyer* baik lokal maupun luar negeri, membuat jaringan ke luar negeri dalam rangka memperluas pasar internasional, mengikut sertakan para pengusaha secara langsung untuk berpameran di luar negeri.
5. Kehadiran penyuluh industri perdagangan dalam rangka meningkatkan kinerja usaha dan perkembangan struktur usaha lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk, strategi pemasaran dan kemampuan manajerial, memberikan arah dan membantu kemampuan merumuskan kebijakan strategi dalam memanfaatkan faktor produksi dan memanfaatkan kesempatan mencari ceruk pasar yang masih dapat diakses. Jangan sampai kehadiran penyuluh industri perdagangan cenderung menimbulkan ketergantungan kegiatan usaha yang pada gilirannya menjadikan pengusaha kurang kreatif dan kurang inovatif.

6. Peningkatan kinerja usaha melalui kebijakan pembinaan pemerintah melalui bantuan pelatihan, peraturan pemerintah, permodalan, pemasaran dan penyuluh industri perdagangan diupayakan tidak hanya memperbesar pendapatan tetapi juga meningkatkan perkembangan struktur industri, dari industri mikro tumbuh menjadi industri kecil, dari industri kecil tumbuh menjadi industri menengah. Hal ini dapat diidentifikasi melalui pertumbuhan investasi, penyerapan tenaga kerja dan omzet penjualan. Ketiga indikator ini perlu juga dievaluasi kategori rendah sedang dan tinggi dengan tujuan pengusaha yang masih berada pada kategori rendah dapat meningkatkan indikator perkembangan struktur usahanya menjadi pengusaha industri kecil yang mempunyai ketiga indikator pertumbuhan berkategori sedang bahkan tinggi.
7. Untuk kepentingan penelitian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan disarankan untuk mengembangkan penelitian yang sifatnya longitudinal agar dapat mengamati secara cermat perkembangan kinerja usaha dan struktur usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Acar, C. Achmad. 1993. The Impact of Key Internal Factors on forms Performance: An Emphirical Study of Small Turkis Firms. *Journal of Small Business Management* Vol. 11 No.8 October: 781.
- Bido, A. Budiman. 2005. *Perizinan menjadi Kendala Utama Investasi*. Kompas. Tahun 14 No. 9.
- Budiono. 2005. *Ekonomi Indonesia Mau Kemana*. Harian Kompas. Tahun ke 14 No. 06.
- Camille, Career. 1999. The Training and Development Needs of Owner-Managers of Small Businesses with Export Potential. *Journal of Small Business Management* Vol. 37 No. 4 (October): 30-41.
- Cole, William. 1999. *Peranan dan Dukungan Kemitraan usaha dalam Pengembangan Klaster*. Makalah disampaikan dalam Seminar on Small and Medium Enterprises Development in Indonesia yang diselenggarakan bersama oleh ADB, ILO, Bappenas dan World Bank, pada tanggal 8-9 Desember di Hotel Borobudur. Jakarta.
- Colm O’Gorman and Roslyn Doran. 1999. Mission Statements in Small and Medium–Size. *Journal of Small Business Management* Vol .37 No. 4 (October): 30-41.

- Dana, Leo Paul. 1999. Preserving Culture Through Small Business : Government Support for Artisans and Craftsmen in Greece. *Journal of Small Business Management* Vol. 37 No. 1 (January): 68-77.
- Depperind. 1995. *Limapuluh Tahun Pembangunan Industri Mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia*. PT. Greenvoice Central Chatulistiwa. Jakarta.
- Depperindag. 2002. *Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah 2002-2004*. Buku 1 Kebijakan dan Strategi Umum Pengembangan Industri kecil Menengah: 45. Un-published.
- Dess dan Davis. 1984. Competencies Needs for Small Business Success Perceptions of Jamaican Entrepreneurs. *Journal of Small Business Management* Vol. 12 No. 8: 73.
- Devine, P. J. *et al.* 1994. *An Introduction to Industrial Economics*. George Allen & Unwin Ltd. Eidinburgh. London.
- Edward, Eric. 1994. The Organization and It's Environment. *Journal Credit Management* Vol. 12 No. 12: 42-48.
- Eitman, W. J. and J. N. Holtz. 1992. *Working Capital Management: Essays on Business Finance*. Mosterco Press. Inc. Ann Arbor.
- Ferdinand, Augusty. 2002. *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen Aplikasi Model-Model Rumus dalam Penelitian untuk Tesis Magister dan Disertasi Doktor*. Seni Pustaka Kunci: BP. UNDIP. Semarang.
- Godfrey, Baldacchino. 1999. Small Business in Small Island: A Case Study From Fiji. *Journal of Small Business Management* Vol. 37. No. 4 (October): 80-84.
- Gonzales, F. 1999. *Comercio Internacional de Servicio: Revision Conceptual y Especial referencial al caso Espanol (International Service Trading: A Conceptual Revision with Special Reference to the Spanish Case)* Granada, Spain. Universidad de Granada.
- Hema, Wijewardane and Garry Tibbits. 1999. Factors Contributing to the Growth of Small Manufacturing Firms: Data From Australia. *Journal of Small Business Management* Vol. 37 No. 2 (April): 88-96.

- Hermosilla, A. 1997. El Consumo de Servicios, por la Industria Espanola La de Cervicis a la Industria (ESI) (The use of Cervices by Spain Industry. The Services to Industry, Survey (ESI). *Economic Industrial* Vol. 313: 77-92.
- Hesel, Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Cetakan Pertama. Yayasan Pembina Administrasi Publik Indonesia. Lukman Offset. Yogyakarta.
- Huck, John F and T. McEwen. 1995. Competencies Need For Small Business Success: Perceptions of Jamaican Enrepreneurs. *Journal of Small Business Management* Vol. 29 No. 4 (April): 90-93.
- Ismail, Rizal. 2002. *Terobosan Pemulihan Ekonomi Indonesia, Upaya Strategis Pemulihan Ekonomi dan Mengatasi Kemiskinan melalui Pengembangan Usaha Kecil Menengah*: 50 – 60. Penerbit Forum Kampus Kuning. Jakarta.
- Ivancevich, J.M.; P. Lorenzi; S.J. Skinner and P.B Crosby. 1996. *Gestion: Tration, Quality and Competitively*. Irwin. Madrid. Spain.
- Jauch, Laurence R. dan William F. Glueck. 1999. *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan* Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Kantor Wilayah Depperind. Provinsi Jatim. 1999. *Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Perdagangan dalam Negeri bagi Pengusaha Industri Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Timur*. Un-Published Surabaya: 118.
- Karmakar, U.S. 1996. Integrative Research in marketing and Operation Management. *Journal of Marketing Research* Vol. XXXIII (May): 125-133.
- Khan, R. and J. Rocha. 1982. Recurring Management Problems in Small Business. *American Jour of Small Business* Vol. 7 No. 1: 50-58.
- Kotler, P. John and Heskert L. James. 1995. *Corporate Culture and Performance*. Second Edition. McGraw-Hill Book Company.
- Kotler. 1994. *Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation, and Control* Seventh Edition. Englewood Clips. Prentice-Hall International Inc.
- La Presse. 1992. *Aid For Small Business Exporting Firms: The Role of Governments and Information Net Works Halifac*. Canada Institute of Research on Public Policy.

- Lessem, R. 1995. An Examination of the Effects of Organizational Structure and Environmental Uncertainty on Entrepreneurial Strategy. *Journal of Management* Vol. 18: 639.
- Manan, Abdul. 1999. *Dampak Pola Pembinaan terhadap Kinerja Sub-Sektor Industri Kecil di Jawa Timur*. Un-Published. Disertasi S3 Unair.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2003. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rafika Aditama. Bandung.
- Manguprawira, Syafri. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik* Cetakan Kedua. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Morrison, Alison *et al.* 2000. *Creating a Seamless Local Government and Small Business Interfase for better Regional Economic Development Outcomes*. Paper Presented at the ICSB. World Conference 2000. Brisbane Australia. June.
- Morrison, Alison and John Breen. 2003. Small Business Growth Intention, Ability and Opportunity. *Journal of Small Business Management* Vol. 41 No. 4 (October): 417-425.
- Moeljadi. 1999. *Pengaruh Beberapa Faktor Internal Perusahaan dan program Asistensi Pemerintah terhadap Kinerja Industri kecil di Jawa Timur*. Un-Published. Disertasi S3. Unair.
- Murp, F. B. Aji. 1999. *Dampak Pembinaan Pemerintah/BUMN/P/Dan terhadap Kinerja UKM di Indonesia*. National Workshop Small and Medium Enterprises Development in Indonesia. 8-9 Desember. Hotel Borobudur. Jakarta.
- Naro, Zainimar R. 2000. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Pengrajin dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Bordir di Jawa Timur*. Un-published. Disertasi S3. Unair.
- Premaratne, S. P. 1999. Networks, Resources and Small Business Growth: The Experience in Sri Lanka. *Journal of Small Business Management* Vol. 37 No. 11 (Januari): 121-127.
- Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 2002. *Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah*. Un-Published. Jakarta.
- Ridwan. 2003. *Skala Pengukuran Variabel-variabel penelitian* Cetakan Kedua. CV. Alfabeta. Bandung.

- Riyanto, Bambang. 1990. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan* Edisi Ketiga. Yayasan Penerbit Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Rumerang, Dience. 1992. *Analisis Tingkat Keberhasilan Usaha Kecil Kerajinan Rotan di Maluku*. Thesis Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Salim, Wahid. 1996. Strategi Kemitraan Tinjauan atas Konsep dan Aplikasinya. *Usahawan Indonesia* Vol. 25 No. 9: 14-17. Jakarta.
- Sarder, Ghost and Rosa. 1997. The Importance of Support Service to Small Enterprises in Bangladesh. *Journal of Small Business Management* Vol. 8 No. 6: 26-36.
- Simanjuntak, P.J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* Edisi Kedua. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Subanar, Harimurti. 1998. *Manajemen Usaha Kecil* Edisi Pertama Cetakan Ketiga. BPFE-Yogyakarta.
- Suparmoko, & M. Irawan. 2002. *Ekonomika Pembangunan* Edisi Keenam Cetakan Pertama. BPFE-Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus. 1999. *Perkembangan Industri Skala kecil di Indonesia* Cetakan Pertama. PT. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Theo and Low. 1994. *Factors Contributing to the Growth of SMES: The Singapore Case, Proceedings to the Fifth Endec World Conference on Entrepreneurship Singapore*. NTV – Intrepreneurship Development Center: 150-161.
- Utami, Muji. 1995. *Beberapa Faktor Keunggulan Strategi yang berpengaruh terhadap Keberhasilan Industri Bordir*. Un-Published. Thesis S2 Unair.
- Vasant, Desai. 2003. *Management of A Small-Scale Industry* Tenth Edition. Himalaya Publishing House. Mumbai-India.
- Viljoen, John. 1991. *How to Analysis, Choose Implementation Corpoprte Strategies* Second Edition. Longman profesional Press. NSW.
- Wijardena, Hema and Shivas Cooray. 1995. Determinant of Growth in Small Japanese Manufacturing Firms, Survey Evidence from Kobe. *Journal of Small Business Management* Vol. 33 No. 4: 87-92.

Yudhoyono, Susilo Bambang. 2005. *Formula Empat Sehat Lima sempurna Kebijakan pembinaan Industri Mikro, kecil Menengah Dalam Rangka Mengatasi Kendala yang Dihadapi Pengusaha IMKM*. Dialog dan Temu Usaha bagi IMKM: 25 Pebruari 2005. Jakarta.